

Pembentukan Propinsi Jambi 1946-1958

Budi Purnomo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96830&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penetapan Karesidnan Jambi ke dalam Propinsi Sumatera Tengah berdasarkan keputusan sidang KN1 Daerah Sumatera 18 April 1946 di Bukittinggi dan desentralisasi Sumatera Tengah. Kemudian, diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1949 tanpa melihat perkembangan dan keinginan masyarakat Jambi serta faktor-faktor politis, sosiologis, ekonomis, historis dan adat-istiadat Semua itu dipandang oleh sebagian masyarakat Jambi telah memperkosa hak-hak demokrasi rakyat.

Pada akhirnya, melahirkan pergolakan, pro kontra atau dualisme keinginan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan berupaya memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan yang dipandang dari segi politis cocok dan sesuai dengan mereka (masyarakat Jambi). Kurangnya alat transportasi dan rusaknya jalan-jalan mengakibatkan sulitnya daerah Jambi berhubungan dengan pusat propinsi di Medan dan Sub Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi. Keadaan ini ikut menumbuhkan kembangkan aliran-aliran dan usaha-usaha untuk memisahkan daerah Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan.

Munculnya gerakan Fropedja 10 April 1954 yang mendapat dukungan dari kalangan otoritas dan partai-partai politik memberikan wacana baru bagi masyarakat Jambi. Pada akhirnya, gerakan Fropedja yang semua mendapat tentangan dari H.P.

Mereka mampu mengakhiri pro kontra atau dualisme keinginan masyarakat itu dan membangun satu kekuatan bersama untuk menuntut tegaknya Daerah Tingkat I Propinsi Jambi.

Barangkat dari kesamaan pandangan atau aspirasi itulah, yang akhirnya membawa mereka ke dalam Kongres Rakyat Jambi 15-18 Juni 1955. Konsekuensi dari kongres ini melahirkan suatu badan yang bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD). BKRD merupakan satu-satunya wadah perjuangan untuk memenuhi (menampung) aspirasi masyarakat Jambi. Begitu juga, BKRD lahir sebagai cerminan kekuatan koalisi dari semua komponen atau kekuatan masyarakat yang ada, baik dari unsur organisasi massa dan pemuda, mantan pejuang, tokoh-tokoh masyarakat maupun partai-partai politik.

Tuntutan status daerah Jambi menjadi daerah otonomi setingkat propinsi itu, menimbulkan tuntutan atas ketidakadilan (perimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan). Karena dipandang dari segi geografis, sosiologis, politis dan ekonomi daerah Jambi telah dapat dan sudah selangkah berotonomi sendiri setingkat propinsi. Karena itu, tuntutan rakyat Jambi mempunyai dasar yang

kuat dan tidak dapat dielakkan lagi baik dari aspek politis, ekonomis dan sosial.

Propinsi Jambi yang telah bertahun-tahun dipeljuangkan dan seiam itu tidak menjadi perhatian pemerintah pusat, akhirnya lahir. Dilahirkannya dengan suatu cara yang luar biasa Dia lahir atas pernyataan rakyat Jambi sendiri. Kemudian diakui dan diresmikan Dewan Banteng, Suatu dcwan yang lahir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Tengah. Begitu juga, propinsi Jambi lahir dalam suatu suasana dimana pemerintah pusat sedang sibuk menghadapi pertentangan-pertentangan dengan daerah-daerah yang merasa tidak puas dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan, kemasyarakatan atau angkatan perang.